

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* GUNA PENINGKATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
(Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Srata (SI)



Oleh:

**Anandi Rezki**  
**2019B1D065**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## SKRIPSI

### PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)



Disusun dan diajukan oleh :

**Anandi Rezki**  
**2019B1D065**

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Mataram 27 September 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.PA**  
**NIDN. 0806058402**

**Pembimbing II**

**Ilham Zitri., S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0817119102**

**Mnyetujui**

**Ketua Program Studi**  
**Ilmu Pemerintahan**



**Yudhi Lestiana, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0827118801**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* GUNA PENINGKATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
(Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ANANDI REZKI**  
**NIM. 2019B1D065**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim Penguji:

**1. Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.PA**  
**NIDN. 0806058402**

(PU)



**2. Ilham Zitri, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0817119102**

(PP)



**3. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0816057902**

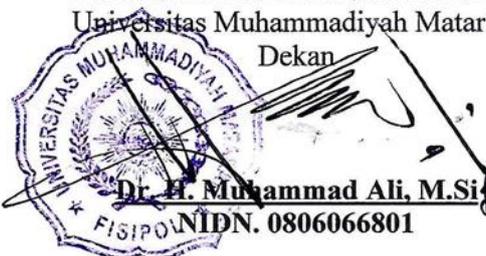
(PN)



Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anandi Rezki**

Nim : 2019B1D065

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu sosial dan Politik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (SARJANA) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di tingkat perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini merupakan murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali, secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyampaian dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang saya peroleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 19 november 2023

Yang membuat pernyataan



Anandi Rezki

Nim. 2019B1D065



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:upt.perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Rerki  
NIM : 2019B1D065  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 21 Desember 1999  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085 238 237 482 / anangrerki123@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*Penerapan Good Governance Utama Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Dongga Kabupaten Bima)*

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 November 2023

Penulis



Anang Rerki  
NIM. 2019B1D065

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anandi Rizki  
NIM : 201310065  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 21 Desember 1999  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fkipol  
No. Hp : 085 238 237 482  
Email : anandyrizky123@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Penerapan Good Governance Guna Peningkatan Pembangunan  
Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo,  
Kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 November 2023

Penulis

  
Anandi Rizki  
NIM. 201310065

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai

## MOTTO

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau intervertasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu bisa kau ceritakan”*

*“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter yang kuat untuk melawan kesulitan”*

*Selalu ada cahaya diujung terowongan*

*Yakin usaha sampai.*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. atas segala kebesaran dan keajaiban yang kutemui dalam separuh perjalanan akademisku, serta sembah sujud atas kemudahan limpahan rahmat berupa kesehatan yang engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Abdul Pali Dan Ibu Nurhayati Ria) yang selalu memberikan yang terbaik untukku. Yang Terus berdoa dan menyayangiku, karena dengan do'a dan segenap cinta kasih kalian, aku bisa bertahan menghadapi kehidupan. Walaupun tidak pernah kuungkapkan lewat bibirku, tapi mataku, tubuhku, jiwaku, dan ragaku menyayangi dan mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri, hanya doa dan rasa terima kasih tiada tara yang bisa kuberikan kepadamu wahai pahlawan abadiku.
3. Kakak ku (Gunawan dan Ita), adik ku (Saiful) dengan sekuat tenaga telah menyemangatiku serta memerhatikannku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
4. Keluarga besar yang selalu memberi nasehat, dan semangat kepadaku selama dalam proses menyelesaikan skripsi dan studi S-1.
5. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II (Bapak Iwin Ardyawin, S.Sos., MA. Dan Bapak Sadrul Imam, S.IP.,M.IP) yang selalu memberikanku semangat dan motivasi, selalu setia menegur dan mendampingiku dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk teman-teman kelas B yang selalu ada untuk membantu dalam segala hal. Terutama sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka.
7. Sahabat setiaku, Rahmawati, Kusnul, Salma, Novi, Meci, Kamarullah, Rahmadani dan Samsiah terima kasih atas dukungan tulusnya dalam memberikan semangat selama dalam perkuliahan dan juga penyusun skripsi ini.
8. Almamater tercinta, yang sudah menemani selama 4 tahun ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya. Sehingga proposal yang berjudul:

“Penerapan *Good Governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ( Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima) ” dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun skripsi ini masi jauh dari kata sempurna.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, M.A. sebagai Rektor Universitas Muhamadiyah Mataram.
2. Dr. H Muhammad Ali, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram.
3. Yudi Lestanata, S.IP., M.IP sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram.
4. Pembimbing I : Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.PA
5. Pembimbing 2 : Ilham Zitri, S.IP., M.I.P
6. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberi kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca untuk pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 10 Juni 2023  
Penulis,

Anandi Rezki  
NIM 2019B1D065

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* GUNA PENINGKATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
( Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima )**  
Anandi Rezki, Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., MPA, Ilham Zitri, S.IP.,M.IP

**OLEH :**

**Anandi Rezki**

**ABSTRAK**

Paradigma pembangunan pemerintah Kabupaten Bima yang mengabaikan harapan masyarakat. Bima ramah selama dua periode tidak pernah ada langkah konkrit dan realisasi pembangunan. Implementasi pembangunan yang berkelanjutan selama dua periode ditimbun dalam wacana, kebijakan publik yang tidak deliberatif, tatanan sosial tidak efisien semakin hari, ketegangan sosial terus menjadi headline yang mengisi ruang publik, sementara masyarakat masih tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk mengakses dan menikmati pembangunan. Konsep *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan servis yang baik yang biasa disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Penerapan *Good Governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dilihat dari partisipasi masyarakat yang melakukan gotongroyong memperbaiki jalan secara swadaya tanpa ada paksaan dari orang lain. Transparansi Pemerintah Kabupaten Bima dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* ditandai dengan pembangunan infrastruktur jalan masih belum maksimal dilakukan. Keterbukaan informasi publik atau transparansi Pemerintah dibutuhkan agar masyarakat mudah mengakses dan informasi yang akan diakses oleh pihak yang berkepentingan harus memadai sehingga dapat dipahami dan dipantau.

**Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Infrastruktur Jalan**

**THE APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE TO IMPROVE ROAD  
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT**  
(Case Study in Donggo Sub-district, Bima Regency)  
*Anandi Rezki, Dr Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., MPA, Ilham Zitri, S.IP., M.IP*

**BY:**

*Anandi Rezki*

**ABSTRACT**

The Bima Regency government's development paradigm disregards community demands. Bima has been friendly for two periods without any meaningful actions or development achievement. During the two periods, the implementation of sustainable development was hoarded in discourse, non-deliberative public policies, inefficient social order, and social tensions continue to be headlines that fill the public space, while the community still does not meet their basic needs to access and enjoy development. The process of using state power in carrying out the provision of good service services is generally referred to as governance (government or governance). This research aimed to discover how strong governance may boost road infrastructure development in Donggo District, Bima Regency. In this study a descriptive qualitative approach was used. The informants in the study totaled 7 people. Data collection techniques, namely, observation, interviews and documentation. The results of the research can be seen from the participation of people who work together to repair the road independently without any coercion from others. The transparency of the Bima Regency Government in governance in accordance with the principles of good governance is marked by the development of road infrastructure that is still not maximally carried out. Public information disclosure or government transparency is needed so that people can easily access and information that will be accessed by interested parties must be adequate so that it can be understood and monitored.

**Keywords: Implementation, Good Governance, Road Infrastructure**

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



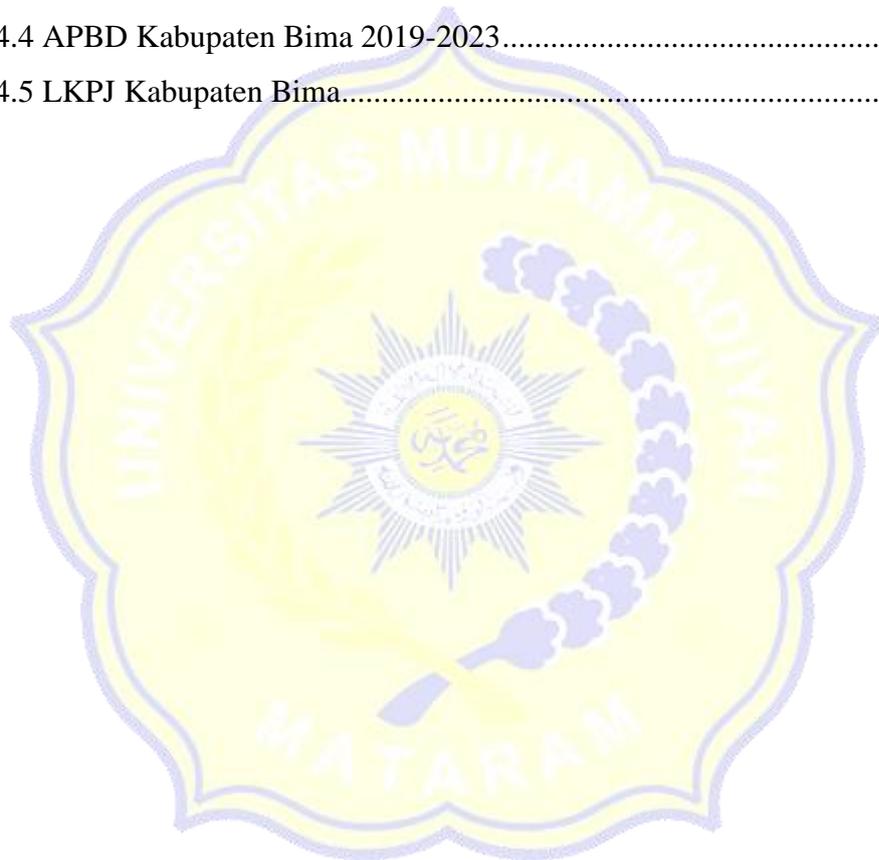
## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1. Kajian Pustaka .....	15
2.2. Tinjauan Teoretis .....	34
2.2.1 Konsep <i>Good Governance</i> .....	34
2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	36
2.2.3 Indikator Kualitas <i>Governance</i> .....	43
2.2.4 Tahap Kinerja <i>Good Governance</i> .....	45
2.2.5 Karakteristik Pemimpin Yang Efektif .....	47
2.2.6 Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi.....	50
2.2.7 Pelayanan Publik .....	54
2.2.8 Definisi Pembangunan.....	58

2.2.9 Definisi Infrastruktur .....	58
2.2.10 Kerangka Pikir .....	60
2.2.11 Definisi Konseptual .....	61
2.2.12 Definisi Operasional .....	62
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1. Metode Penelitian .....	63
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	64
3.3. Teknik Penentuan Narasumber .....	64
3.4. Sumber Data .....	64
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.6. Teknik Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Donggo .....	70
4.1.1 Struktur Organisasi.....	72
4.2. Hasil Penelitian.....	80
4.2.1 Partisipasi Masyarakat .....	80
4.2.2 Transparansi .....	81
4.2.3 Akuntabilitas .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	62
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian .....	65
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Donggo .....	72
Tabel 4.2 Kondisi Jalan.....	83
Tabel 4.3 Jumlah Total Keseluruhan Jalan .....	84
Tabel 4.4 APBD Kabupaten Bima 2019-2023.....	88
Tabel 4.5 LKPJ Kabupaten Bima.....	89



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Paradigma pembangunan Bupati Bima yang mengabaikan harapan masyarakat. Kekuasaan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri selama dua periode tidak pernah ada langkah kongkrit dan realisasi pembangunan. Implementasi pembangunan yang berkelanjutan selama dua periode ditimbulkannya dalam wacana, kebijakan publik yang tidak deliberatif, tatanan sosial semakin hari semakin rusak, ketegangan sosial terus menjadi headline yang mengisi ruang publik, sementara masyarakat masih tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk mengakses dan menikmati pembangunan.

Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima terjadi diberbagai kecamatan. Jalan rusak tidak diperbaiki bertahun-tahun dan dibiarkan tanpa adanya inisiatif untuk memperbaiki jalan yang layak digunakan bagi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Melalui kepemimpinan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri pembangunan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan selama bertahun-tahun. Kondisi jalan yang sangat sempit, berlubang-lubang dan dihiasi batu kerikil menumpuk menghiasi badan jalan hingga membentuk sungai.

Masyarakat Kabupaten Bima dalam realitas mengalami dan merasakan keberadaan infrastruktur jalan yang tidak memadai dan tidak layak untuk dilalui. Masyarakat dalam aktivitas kesehariannya terganggu akibat dari kondisi jalan yang rusak. Aktivitas masyarakat Kabupaten Bima yang

beragam ditandai dengan aktivitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan merajut kebudayaan dalam bingkai persatuan mengalami kendala yang signifikan. Hal ini laju pertumbuhan daerah diberbagai sektor mengalami penurunan yang dramatis.

Setiap tahun jumlah APBD Kabupaten Bima hampir mencapai 2 triliun. Dari jumlah APBD tersebut, setiap tahun digelontorkan kisaran 100 miliar untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan, infrastruktur yang salah satunya pembangunan jalan. Data Pemerintah Kabupaten Bima (LKPJ Bupati 2019) menyatakan bahwa jalan mantap Kabupaten Bima 2018 itu 369,32 km menjadi 378,392 km di tahun 2019. Di lansir dari Bima dalam angka 2021, total jalan kewenangan Kabupaten Bima itu : 831.611 km. Menurut jenisnya, jalan itu dibagi menjadi 4 kategori yakni, aspal: 449,38 km, kerikil: 149,30 km, tanah: 215,11 km, dan jalan penetrasi 17,82 km. Kemudian kondisi jalan baik pada tahun 2019 itu 315,26 km, menjadi 349,76 km pada tahun 2020 dan menjadi 428,628 km ditahun 2021. Kondisi jalan sedang pada tahun 2019 itu 63,14 km, menjadi 79,17 km tahun 2020 dan menjadi 33,722 ditahun 2021. Kondisi jalan rusak pada tahun 2019 itu 165,88 km, menjadi 72,93 km pada tahun 2020 dan menjadi 340,348 km ditahun 2021. Sementara kondisi jalan rusak berat pada tahun 2019 itu 297,34 km, menjadi 329,76 km tahun 2020 dan menjadi 28,917 km ditahun 2021 (<https://www.lpwntb.or.id>, Satria Madisa ).

Merujuk data diatas, dapat disimpulkan bahwa; peningkatan jalan baik dari tahun 2019 ke 2021 mengisyaratkan kemajuan. Kemudian, penurunan

kualitas jalan sedang pada tahun 2020 ke 2021 nampak progresif. Sedangkan peningkatan jalan rusak meningkat tajam dari tahun 2020 ke 2021, serta penurunan jalan rusak berat pada tahun 2020 ke 2021 berlangsung sangat tajam. Selain itu, fakta peningkatan jalan mantap berbanding lurus dengan peningkatan jalan rusak. Patut diduga, selain format kebijakan publik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, pemerintah daerah buruk paradigma pembangunannya. Dimana, meningkatnya jalan rusak dalam fakta sebenarnya karena paradigma yang hanya tahu: peningkatan jalan. Paradigma ini berpotensi disertai penggelapan jabatan demi KKN. Pemerintah Kabupaten Bima tidak benar-benar dalam realitas mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan perawatan infrastruktur. Seharusnya jalan yang mulai rusak yang mestinya bisa dialokasikan anggaran perawatan dan rehabilitasi dengan harus terpaksa semakin rusak setiap tahun. Kerusakan itu harus memanjang baru diperbaiki melalui peningkatan jalan. Hal tersebutlah yang membuat jalan rusak di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima semakin meningkat, seperti bom waktu. Pemerintah Kabupaten Bima melalui kepemimpinan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri seharusnya bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan layak bagi masyarakat mempengaruhi pembangunan daerah yang berkemajuan. Aktivitas masyarakat yang beragam didukung oleh keberadaan pembangunan infrastruktur jalan yang baik.

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dan layak sangat diperlukan sebagai akses paling penting bagi kelancaran aktivitas masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai dan layak memberikan dampak positif yang besar bagi kelancaran aktivitas masyarakat dibidang pendidikan, sosial, peningkatan ekonomi, dan kebudayaan. Melihat kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bima tidak memadai dan tidak layak bagi masyarakat, karena berbagai wilayah mengalami kerusakan.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga sebagai salah satu kunci dalam pembangunan suatu bangsa yang berkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Seperti yang kita ketahui, infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang keberlangsungan kegiatan masyarakat sehingga dapat menekan efisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kebutuhan akan infrastruktur menjadi hal yang vital bagi setiap negara (<https://www.academia.edu>, Bella Arum).

Di samping itu, infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Selain itu juga transportasi berfungsi sebagai: *pertama*, katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, *kedua*, pengembangan wilayah, *ketiga*, pemersatu wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), dan *ke empat*, fungsi pelayanan publik. Infrastruktur juga mempunyai peran vital yakni: a) dalam

mendukung ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir; b) merupakan modal sosial masyarakat; c) memfasilitasi lebih terbukanya pengetahuan masyarakat; (4) mempertemukan budaya antar masyarakat; e) mengikat dan menghubungkan antar daerah; dan f) melalui dukungan ketahanan pangan memberikan rasa aman tercukupi kebutuhan dasarnya. Fakta menunjukkan bahwa peran vital infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh kesuksesan berbagai program ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur (Hardjosoewito, 2010:2).

Berdasarkan hal demikian, untuk meningkatkan serta menaikkan kualitas yang efektif bagi kinerja pemerintahan, maka perlu dilakukannya kerjasama yang utuh guna menambah rasa kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil kesimpulan dalam memfokuskan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Implementasinya, Pemerintahan daerah harus dibekali dengan prinsip pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik adalah proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*).

Untuk mewujudkan tujuan harapan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan *good governance*. Secara ringkas *good governance* pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*),

menjadi perhatian karena peran pemerintah (*institution*) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Reformasi yang diharapkan langkah awal untuk membangun *good governance* pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel masih banyak yang mengalami hambatan besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental.

Dalam hal ini, pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diapresiasi oleh seluruh masyarakat (Bahru Rozi, 2016:5).

Pemerintah yang baik (*good governance*) kini menjadi isu sentral yang diidam-idamkan semua warga negara. Namun kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan negara khususnya dalam konteks pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang guna mengimplementasikan *good governance* seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintah yang baik oleh masyarakat, Seperti infrastruktur perbaikan jalan yang banyak tidak diselenggarakan oleh pejabat pemerintahan. Dalam perwujudannya sendiri *good governance* ialah penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki peran masing-masing, pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan pengatur jalannya pemerintahan, sedangkan masyarakat memiliki peran untuk

selalu ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada pelaksanaan prinsip *good governance*, negara merupakan pihak yang paling penting dalam mewujudkan prinsip tersebut. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dan di harapkan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara baik dalam pembuat kebijakan maupun dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam rangka tersebutlah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anissa Rossae, 2019:1-2).

Ditengah maraknya isu *good governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ternyata saat ini, beberapa masalah-masalah dalam pembangunan sering bermunculan, salah satunya dalam kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Nor selama dua periode sejak tahun 2016 sampai sekarang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tidak sepatasnya masyarakat dilanda masalah infrastruktur. Dalam realitas pembangunan infrastruktur berbagai kecamatan di Kabupaten Bima misalnya di Kecamatan Donggo mulai dari tahun 2016 sampai 2023 sekarang jauh panggang dari api. Kondisi infrastruktur jalan di berbagai Desa di Kecamatan Donggo sangat parah. Diberbagai ruas jalan dapat dijumpai kubangan yang sangat besar hingga panjang yang menurut saya mencerminkan ketidakhadiran pemerintah daerah.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan *good governance*, pemerintah daerah dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, penerapan prinsip *good governance* (pemerintahan atau tata pemerintahan yang baik) sangat penting untuk diterapkan serta harus sinergis dengan pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip *good governance* dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik termasuk di dalamnya menjalankan fungsi pembangunan perlu adanya penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Anissa Rossae, 2019: 5).

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu karena kondisi jalan Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Donggo sangat memprihatinkan. Kerusakan jalan menjadi pemandangan yang tidak indah dipandang, akibatnya tidak nyaman dilalui oleh pengguna motor dan mobil. Kondisi jalan yang sudah berlangsung selama 5 tahun biarkan saja oleh pemerintah. Selain itu, dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya pada persoalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini disebabkan karena didalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih atau *good governance*. Kondisi jalan yang tidak diperbaiki pemerintah Kabupaten Bima selama 5 tahun terakhir sampai saat ini segenap elemen masyarakat di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima secara swadaya melakukan tambal

sulam jalan yang rusak. Dimana perbaikan ini benar-benar murni inisiatif masyarakat itu sendiri untuk mau kerja gotong royong walaupun dengan sistem tambal sulam. Selain partisipasi masyarakat Kecamatan Donggo ada juga donasi dari pengusaha Donggo yang ada di Jakarta yakni Direktur Utama PT JM Mutu Jayakarta. Sebab bila dibiarkan jalan yang rusak tanpa diperbaiki, maka akan memakan banyak korban jiwa dan menyulitkan para pengendara roda dua dan empat melewati jalan tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penerapan *Good Governance* Guna Pembangunan Infrastruktur Jalan Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima** dengan harapan memperkaya literatur, pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang uraikan diatas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Good Governance* Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat serta mengetahui tentang Penerapan *Good Governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah cakrawala berpikir serta pengetahuan pembaca terkait Bagaimana Penerapan *Good Governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- b. Selain dari itu, peneliti dapat memperluas cakrawala berfikir secara komprehensif dan dapat memahami berbagai ilmu terkait di dalamnya tentang apa saja Penerapan *Good Governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

### 3. Manfaat Akademik

Yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelurusan terhadap yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

1. Arif Cahyadi (2016). “*Good governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya)*” Dalam urainnya, peneliti tersebut mengetahui bagaimana penerapan prinsip nilai *Good Governance* dalam penyediaan pelayanan E-KTP di Kecamatan Sukolilo Surabaya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan yang digunakan dalam adalah : wawancara, kuisisioner dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dari pembahasan tingkat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Sukolilo Surabaya dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan E-KTP cukup baik, sedangkan dalam tingkat kualitas pelayanan E-KTP di Kecamatan Sukolilo Surabaya dalam tingkat pelayanan E-KTP dikategorikan cukup baik.
2. Anas Heriyanto (2015). “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*” Dalam urainnya, peneliti mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo, serta mengetahui hambatan penerapan prinsip-prinsip dalam tata

kelola Pemerintahan Desa Triharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan subjek yang digunakan adalah teknik *purposive*. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman pada bulan Mei sampai Juni 2015. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dusun, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakkan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi, orientasi consensus. 2) hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. 3) upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang

berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

3. Bahru Rozi (2016). "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten*" Dalam pembahasannya, penelitian Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrument penelitian ini yaitu peneliti sendiri sedangkan sumber penelitian adalah pemerintah, kontraktor dan masyarakat Kabupaten Lebak. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Haberman. Uji keabsahan data, triangulasi dan membercheck. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sedarmayanti, yang terdiri dari empat prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, keberbukaan dan aturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian *good governance* di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas yang belum maksimal dari hasil kinerjanya, bentuk transparansi yang tidak efektif dan menyeluruh, lemahnya supremasi hukum dan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki. Agar *good governance* bisa diterapkan

dengan efektif dan efisien maka perlu meningkatkan pengawasan pada proses dan pelaksanaan pembangunan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik agar terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM pegawai yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak.

4. Ajat Sudrajat dan Nurkholis (2022). *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”* Dalam penelitian ini untuk mengetahui partisipasi di dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cicililin Kabupaten Bandung Barat. Dengan fokus penelitian meliputi jenis-jenis Partisipasi Masyarakat di Dalam Pembangunan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan dokumentasi serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kidang Pananjung, melalui jumlah penduduk penduduk 3650 jiwa dan terdapat kepala keluarga (KK) sejumlah 1826 jiwa laki-laki dan 1824 wanita. Hasil pengamatan lapangan pembangunan Infrastruktur Desa yang dilaksanakan masih ditemukan berbagai masalah atau kendala satu diantaranya adalah kurangnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam mewujudkan kerjasama untuk pembangunan desa yang di programkan oleh

Pemerintahan Desa. Walaupun diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilakukan hanya semata untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.

5. Wahyu Suprianto (2018). *“Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012”* Dalam pembahasannya, bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Kecamatan Gunung Sindur untuk mengalokasikan anggaran merupakan aktivitas politik. Berbagai kepentingan baik politik maupun kekuasaan, demi tercapai tujuan masing-masing aktor yang merupakan cerminan dari politik anggaran. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur tahun 2012. Adapun tipe penelitian yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur tidak terlepas adanya kepentingan politik dari aktor-aktor terkait yang berada dilembaga eksekutif. Adanya kepentingan politik berkaitan dengan kebijakan, pengalokasian, serta pelaksanaan anggaran terdapat unsur perilaku oportunistik yang dilakukan oleh elit politik untuk memenuhi janji kepada

masyarakat yang mengakibatkan ketidakjelasan pengalokasian anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur.

6. Noverman Duadji (2012). “*Good Governance Dalam Pemerintah Daerah*” Dalam pembahasannya, bahwa *governance* merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja tinggi. Merespon hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai landasan legal formal, mulai dari Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sampai dengan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam rangka mencapai *good governance*, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar *good governance*: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan partisipasi (*participation*) haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai *good governance* dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan pada kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*) atas penyelenggaraan pemerintahan sebagai sebuah respon pemerintah secara periodik atas setiap pertanyaan-pertanyaan (keluhan) publik dan konsekuensi yang harus diterima oleh aparatur publik ke depan sebagai tindakan tanggung-gugat peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan. Informasi mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan program (kebijakan) serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan aspek: komunikasi publik oleh Pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dengan keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, maka akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun pelaksanaan program (kebijakan) sektor publik.

7. Safrijal, M. Nasir Basyah, Hasbi Ali (2016). "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Public Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*" Dalam pembahasannya, bahwa penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kecamatan Kluet Utara belum berjalan dengan sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsip-prinsip *good governance*, *good governance* baru diterapkan semenjak pertengahan 2015. Masyarakat masih merasa kurang puas dengan pelayanan yang di berikan oleh aparatur, dan tingkat kedisiplinan aparatur juga masih kurang. dalam penerapannya juga belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh kendala-kendala yang menghambat efektifitas pelayanan. Adapun kendala tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip *good governance*, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan

fasilitas pelayanan. Disarankan kepada pimpinan kecamatan *kluet* utara Kabupaten Aceh Selatan terus melakukan pembaharuan system pelayanan, meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan pelayanan publik, dan masyarakat terus meningkatkan partisipasinya dalam membangun kecamatan Kluet Utara, membenahi dan mengurangi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan aktifitas pelayanan.

8. Rima Andini (2017). "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara*" Dalam pembahasannya, bahwa Tenggarong masih memiliki kekurangan. Dimana masyarakat masih penerapan prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di kantor Camat Tenggarong telah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanggungjawaban pegawai negeri sipil terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan. Walaupun masih ada pegawai yang keluar saat jam kerja, namun sebagian besar pegawai sudah memahami tupoksinya masing-masing sehingga ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan tanpa dipungut biaya sesuai dengan aturan yang ada. Penerapan prinsip *good governance* dalam hal transparansi di Kecamatan mengeluhkan masalah informasi tentang prosedur kepengurusan berkas-berkas yang harus ke Kantor Camat dulu hanya untuk mengetahui syarat-syaratnya, karena belum maksimalnya pemanfaatan *website* Kantor Camat Tenggarong.

Responsivitas kinerja pegawai Kecamatan cukup baik. Dimana pegawai kecamatan memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat, terkait dengan perbaikan pelayanan. Hanya saja keluhan masyarakat tentang pemanfaatan *website* kecamatan belum ada perubahan. Efisiensi kinerja dalam konteks *good governance* di lingkungan kerja kecamatan Tenggarong dapat dikatakan belum seluruhnya dapat terwujud. Dimana dalam memberikan pelayanan tidak ada waktu pasti dalam penyelesaian pengurusan. Yang sering menjadi masalah adalah adanya gangguan secara teknis, seperti dalam perekaman E-KTP. Profesionalisme pegawai di Kecamatan Tenggarong, dapat dikatakan pegawai dalam menjalankan tugasnya masih kurang profesional. Hal tersebut terlihat dari masih adanya faktor kekerabatan dalam prioritas pelayanan serta masih adanya pegawai yang berperilaku tidak patuh terhadap ketentuan kantor. Faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Camat Tenggarong adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sementara faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Camat Tenggarong adalah sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai.

9. Wiwiek Kusumaning Asmoro, Novie Astuti Setianingsih (2019). *“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan*

*Pemerintahan Kota Kediri*” Dalam pembahasannya, bahwa penerapan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana prodamas terhadap *good government governance*. Hasil korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang kuat atas variabel transparansi, akuntabilitas dan *good government governance*. Berdasarkan hasil penelitian, maka tata kelola dana Prodamas di tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri adalah baik karena telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana Prodamas. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini terbatas pada pihak pengelola Prodamas di kelurahan dan RT saja. Penyebaran kuesioner tidak dilakukan terhadap warga yang merasakan dampak dari kegiatan Prodamas yaitu berupa program fasilitas yang diberikan guna peningkatan sosial,ekonomi dan infrastruktur pada daerah warga tersebut.

10. Kasmira, Alyas, Sudarman (2020). *“Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa”* Dalam pembahasannya, bahwa untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang adalah Kepala Bidang Bina Marga, Seksi Pembangunan/peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan 2 orang Masyarakat Pengguna Jalan. Sumber data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil menunjukkan bahwa

Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik karena dari sisi sumber daya manusia, efektifitas, tujuan sudah maksimal sesuai tanpa pemborosan (tidak membuang-buang, waktu, tenaga, biaya) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Meskipun berjalan dengan optimal karena kendala yang sering terjadi yaitu pada anggaran/biaya yang tertunda sehingga pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jalan masih kurang efisien.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA /TAHUN	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI
1	Arif Cahyadi (2016)	Good governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan Elektronik kartu tanda penduduk Berbasis Good Governance di Kecamatan sukolilo Surabaya)	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan dari pembahasan tingkat penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelayanan E-KTP di kecamatan Sukolilo Surabaya dalam pnerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam pelayanan E-KTP cukup baik, sedangkan dalam tingkat kualitas pelayanan E-KTP di Kecamatan Sukolilo Surabaya Dalam tingkat pelayanan E-KTP dikategorikan cukup baik.	Penelitian sama-sama berfokus pada peran <i>good governance</i> . Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaanya, penelitian sebelumnya membahas terkait <i>good governance</i> pada kualitas pelayanan E-KTP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang <i>good governance</i> pada peningkatan

					pembangunan infrastruktur jalan.
2.	Anas Heriyanto (2015)	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakkan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi, orientasi consensus. 2) hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. 3) upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan	Penelitian sama-sama memiliki focus yang mengarahkan pada sembilan prinsip <i>good governance</i> . Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan subjek yang digunakan adalah teknik <i>purposive</i> . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif saja.

				pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).	
3.	Bahru Rozi (2016)	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	Metode penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian <i>Good Governance</i> di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak belum maksimal, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> seperti akuntabilitas yang belum maksimal dari hasil kinerjanya, bentuk transparansiyag tidak efektif dan menyeluruh, lemahnya supremasi hukum dan kurangnya kualitas SDM yang dimiliki. Agar <i>good governance</i> bisa diterapkan dengan efektif dan efisien maka perlu meningkatkan pengawasan pada proses dan pelaksanaan pembangunan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik agar terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM pegawai yang dimiliki oleh Dinas	Penelitian sama-sama membahas terkait infrastruktur jalan. Sama-sama menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Perbedaannya, yakni pada lokasi penelitian. penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Sedangkan penelitan yang akan dilakukan yakni di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

				Bina Marga Kabupaten Lebak.	
4.	Ajat Sudrajat Dan Nurkholis (2022)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kidang Pananjung, melalui jumlah penduduk 3650 jiwa dan terdapat KK (kepala keluarga ) yang terdiri dari 1826 jiwa laki-laki dan 1824 wanita. Hasil pengamatan lapangan pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan masih ditemukan berbagai permasalahan (kendala) satu diantaranya didalam pembangunan masyarakat sebagian besar tidak bisa menghadiri kegiatan yang diprogramkan pemerintahan desa. Walaupun diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilakukan hanya semata untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.	Penelitian sama-sama berfokus pada infrastruktur jalan. Sama-sama menggunakan deskriptif. Perbedaannya yakni, penelitian sebelumnya mengarah pada partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan mengarah pada penerapan <i>good governance</i> .
5.	Wahyu Suprianto (2018)	Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di	Penelitian sama-sama membahas terkait dengan peran pemerintah daerah dalam

		<p>Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2012</p>		<p>Kecamatan Gunung Sindur tidak terlepas adanya kepentingan politik dari aktor-aktor terkait yang berada dilembaga Ekaekutif. Adanya kepentingan politik berkaitan dengan kebijakan, pengalokasian, serta pelaksanaan anggaran terdapat unsur perilaku oportunistik yang dilakukan oleh elit politik untuk memenuhi janji kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidakjelasan pengalokasian anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur.</p>	<p>pembangunan infrastruktur jalan. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian sebelumnya mengarah pada kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengarah pada penerapan <i>good governance</i>.</p>
6	Noverman Duadji (2012).	<i>Good Governance</i> Dalam Pemerintah Daerah	Metode penelitian kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Governance</i> merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja tinggi. Merespon hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai landasan legal formal, mulai dari Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sampai dengan Kebijakan</p>	<p>Sama-sama membahas terkait <i>Good Governance</i>. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, bahwa penelitian sebelumnya mengarah pada Pemerintah Desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengarah pada</p>

				<p>Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam rangka mencapai good governance, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar good governance: akuntabilitas (<i>accountability</i>), transparansi (<i>transparency</i>), dan partisipasi (<i>participation</i>) haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai <i>good governance</i> dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal.</p>	<p>pembangunan infrastruktur jalan.</p>
7	<p>Safrijal, M. Nasir Basyah, Hasbi Ali (2016)</p>	<p>Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanc e Oleh Aparatur Pelayanan Public Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> di Kecamatan Kluet Utara belum berjalan dengan sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>, <i>Good Governance</i> baru diterapkan semenjak pertengahan 2015. Masyarakat masih merasa kurang puas dengan pelayanan yang di berikan oleh aparatur, dan tingkat</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai penerapan Good Governance. Sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Perbedaannya yakni pada lokasi penelitian, penelitian selanjutnya dilakukan di Kecamatan Donggo Kabupaten</p>

				<p>kedisiplinan aparatur juga masih kurang. dalam penerapannya juga belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh kendala-kendala yang menghambat efektifitas pelayanan.</p>	Bima.
8	Rima Andini, (2017)	<p>Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Camat Tenggarong telah berjalan baik. Selain itu untuk penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam hal transparansi di Kecamatan Tenggarong masih memiliki kekurangan. Responsivitas kinerja pegawai Kecamatan cukup baik. Faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Camat Tenggarong adalah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Semetara faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai.</p>	<p>Sama-sama mengarah pada penerapan <i>Good Governance</i>. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya bahwa, penelitian sebelumnya berfokus dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan focus pada penerapan <i>good governance</i> guna meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan.</p>

9	Wiwiek Kusumaning Asmoro, Novie Astuti Setianingsih (2019).	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola dana Prodamas di tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri adalah baik karena telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan dana Prodamas. Penyebaran kuesioner pada penelitian initerbatas pada pihak pengelola Prodamas di kelurahan dan RT saja. Penyebaran kuesioner tidak dilakukan terhadap warga yang merasakan dampak dari kegiatan Prodamas yaitu berupa program fasilitas yang diberikan guna peningkatan sosial,ekonomi dan infrastruktur pada daerah warga tersebut	Sama-sama menggunakan prinsip <i>Good Governance</i> akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya bahwa, penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif dan tehnik pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap yakni: pengeditan, koding, dan tabulasi data. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
10	Kasmira, Alyas, Sudarman (2020)	Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik karena dari sisi sumber daya manusia, efektifitas, tujuan sudah maksimal sesuai tanpa pemborosan (tidak membuang-buang,	Sama-sama berfokus dalam pembangunan infrastuktur jalan. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya bahwa, penelitian

				waktu, tenaga, biaya) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Meskipun berjalan dengan optimal karena kendala yang sering terjadi yaitu pada anggaran/biaya yang tertunda sehingga pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jalan masih kurang efisien.	sebelumnya mengarah pada strategi pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengarah pada penerapan <i>Good Governance</i> .
--	--	--	--	---	---

*Sumber : Artikel Jurnal*

Dalam hal ini, yang dapat dibedakan antara penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu ialah perbedaan kondisi sosial politik meliputi, kebijakan publik yang tidak deliberatif, Pemerintah Kabupaten Bima tidak benar-benar dalam realitas mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan perawatan infrastruktur, tatanan sosial semakin hari semakin rusak serta ketegangan sosial terus menjadi headline yang mengisi ruang publik, sementara Pemerintah Kabupaten Bima masih tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mengakses dan menikmati pembangunan. Perbedaan kondisi sosial politik inilah yang kemudian mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip

*Good Governance* dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Selanjutnya adalah perbedaan kondisi sosial politik ini dengan jelas pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat akan berbeda-beda tahapan pelaksanaannya antara wilayah yang satu dengan lainnya.

## **2.2. Tinjauan Teoretis**

### **2.2.1 Konsep *Good Governance***

Baru sekitar 15 tahun wacana tentang *good governance* dan pemahaman yang ingin kita bahas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai *governance*, *governance management*, atau *governance management*, pertama kali muncul, terutama setelah berbagai lembaga keuangan internasional membentuk *good governance* sebagai persyaratan umum untuk setiap program bantuannya pemerintah yang amanah. Misalnya, digambarkan memiliki pemerintahan yang sangat baik, menurut Bintoro Tj okroamindjojo, yang mengklaim bahwa kata pemerintahan yang baik telah diterjemahkan ke dalam berbagai arti. Menurut LAN, itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, meskipun Kartini (2011:15) mendefinisikannya lebih sempit sebagai administrasi “pemerintahan yang bersih”.

Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-27, bertanggung jawab atas pengenalan disiplin studi administrasi publik, yang mencakup istilah tata kelola, sekitar 125 tahun yang lalu. Namun selama periode itu tata kelola telah diartikan terbatas dalam literatur ilmu administrasi dan politik. Frasa ini benar-benar telah digunakan selama sekitar 120 tahun dalam literatur ilmu administrasi dan politik.

Implementasi otonomi daerah melalui asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah melahirkan suatu pemerintahan daerah (*local government*) yang disertai tugas dan tanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomi rumah sendiri biasa disebut demikian, sedangkan pemerintah disebut demikian, atau pemerintah daerah yang mengatur wilayahnya sendiri disebut demikian. Sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanyalah salah satu kewenangan pengawasan antara kedua pemerintah tersebut. Pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik oleh pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan praktik pemerintahan yang baik.

*Good governance* merupakan kekuasaan dijalankan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses pemerintahan. Menurut Basri (2007: 46), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mencakup konsep-konsep responsif, adil, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan, untuk beberapa nama yang paling penting.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, *good governance* diartikan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Melalui munculnya globalisasi, pemerintahan yang baik ialah muncul sebagai masalah kritis, dengan keinginan untuk pemerintahan yang baik menjadi persyaratan, yang biasanya difasilitasi oleh kesadaran

publik yang meningkat. Pemerintahan menurut program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), ialah penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola kegiatan negara di semua tingkatan.

Menurut konsep ini, pemerintahan mencakup tiga kategori: negara (pemerintah), dunia bisnis (sektor swasta), dan individu yang sering beradaptasi satu sama lain. Selain menjunjung tinggi aspirasi rakyat, kemandirian, unsur fungsional, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengertian *good in good governance* mencakup berbagai konsep tambahan. Dalam konteks pengaturan negara, tata pemerintahan yang baik mengacu pada kesepakatan yang diperoleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang dikembangkan secara bersama-sama. Menciptakan komunikasi di antara pemain domestik yang signifikan sangat penting untuk memperoleh kinerja yang produktif serta memastikan bahwa semua pihak percaya bahwa mereka mengendalikan proses regulasi.

### **2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Menyadari pentingnya masalah ini, peneliti mencoba mengajukan empat konsep mendasar dalam penerapan sistem pemerintahan yang baik, seperti yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2012), yaitu sebagai berikut:

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Suatu organisasi keberadaan manusia yang berinteraksi menurut sistem konvensi tertentu yang berkesinambungan dan dihubungkan oleh perasaan identitas bersama disebut sebagai masyarakat.

Semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mencerminkan kepentingan mereka dalam masyarakat yang demokratis. Keterlibatan berbasis luas ini didasarkan pada kebebasan berkumpul dan berbicara, serta kemampuan untuk berkontribusi secara produktif dalam percakapan. Penjelasan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Pasal 127 angka 2 mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah daerah:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilakukan oleh desa atas inisiatif sendiri sangat dianjurkan.
- b. Pengembangan rencana dan kegiatan pembangunan desa jangka panjang yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di masyarakat.
- c. Rencana pembangunan desa harus didasarkan pada prioritas, potensi, dan nilai-nilai yang diidentifikasi oleh kearifan kolektif masyarakat.
- d. Orang miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok kurang beruntung lainnya harus mempertimbangkan kepentingan mereka ketika merencanakan dan menganggarkan.
- e. Siapkan kerangka keterbukaan dan akuntabilitas untuk memandu pelaksanaan pemerintah desa dan inisiatif pembangunan desa di komunitas Anda.

- f. Memanfaatkan lembaga masyarakat lokal serta lembaga adat adalah penting.
- g. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa didorong melalui diskusi desa yang dilakukan secara rutin.
- h. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di masyarakat desa sedang direncanakan dan dilaksanakan.
- i. Bantuan kepada masyarakat setempat dalam jangka panjang.
- j. Terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, anda akan mengawasi dan memantau pelaksanaannya.

## 2. Transparansi

Transparansi adalah strategi keterbukaan dalam pengawasan sementara yang dimaksud dengan informasi ialah informasi yang berkaitan setiap bidang kebijakan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran. Pengungkapan informasi diyakini menghasilkan persaingan politik yang sehat dan toleran, dan keputusan kebijakan dibuat berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai suatu konsep yang menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai.

Aliran informasi yang bebas adalah dasar dari transparansi. Semua prosedur, lembaga, dan informasi pemerintah harus mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami dan dipantau oleh semua pihak. Hal tersebut digarisbawahi dalam Pasal 127 angka 2 huruf E, sebagai bentuk transparansi, sebagai berikut: “Membangun sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa”.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi memperlihatkan kesediaan pemerintah untuk bersikap transparan (transparan) dalam memberikan informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menginginkan informasi tersebut.

### 3. Efektivitas

Kata efektivitas dan efisiensi tidak dapat dipertukarkan karena memiliki arti yang berbeda, meskipun pada kenyataannya kata efisiensi dan efektivitas sering digunakan bersama-sama. Ketika membandingkan pengeluaran dan hasil, efisiensi ditekankan, tetapi efektivitas secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan.

*Efficacious* berasal dari kata efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang telah diselesaikan dengan memuaskan. Menurut Harbani Pasolong (2007:4), istilah "efek" berasal dari kata "efektivitas", dan frasa ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Kemampuan untuk menjadi efektif dapat dianggap sebagai

penyebab faktor lain. Istilah "efektivitas" mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan sebelumnya, atau dengan kata lain, pencapaian target sebagai hasil dari proses kegiatan.

Menurut kamus ilmiah populer, khasiat didefinisikan sebagai kesesuaian penggunaan, penggunaan, atau dukungan untuk tujuan tertentu. Dari segi produktivitas, efektivitas merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan kerja yang maksimal, yaitu tercapainya target yang dikaitkan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Robbins dalam Tika P. (2008:129) menyajikan definisi efektivitas organisasi sebagai tingkat kinerja yang dicapai oleh pemerintah melalui jangka waktu yang pendek maupun jangka yang panjang. Gagasannya ialah bahwa efektivitas adalah tolak ukur untuk menggambarkan jumlah keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Menurut buku Liang Gie *Encyclopedia Of Administration* (2007:127), "efektivitas adalah situasi yang dicirikan oleh apresiasi terhadap kemungkinan bahwa dampak atau efek yang diinginkan akan tercapai." Prosedur dan lembaga pemerintah mencapai nilai dengan keinginan masyarakat dan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin.

#### 4. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban seseorang atau organisasi diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, serta untuk

menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakannya kepada mereka yang berhak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban, menurut lembaga ketatanegaraan dan keuangan Negara Republik Indonesia. dan badan pengawas pembangunan (2000:12). Akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, ketergantungan, dan kredibilitas dipertahankan. Akuntansi tidak abstrak tetapi nyata di alam, dan itu harus diatur oleh undang-undang melalui serangkaian proses yang sangat tepat seputar masalah yang tanggung jawab harus ditetapkan.

Individu yang memiliki kenginan terhadap pemerintahan, sektor bisnis, dan kelompok masyarakat bertanggungjawab baik kepada publik maupun kepada institusi tempat mereka bekerja. Tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan, jenis tanggung jawab bervariasi satu sama lain dalam sifatnya. 'Pasal 3, ayat 1, ayat 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang proses dan mekanisme pengambilan keputusan bagi masyarakat desa memverifikasi itu', kata menteri desa:

- a. Atas dasar hak dan kewajiban masyarakat dan dengan partisipasi seluruh anggota masyarakat, diselenggarakan musyawarah desa yang partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel.
- b. Memperoleh informasi menyeluruh dan akurat tentang isu-isu strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa dengan menghubungi pihak terkait.

- c. Mengenai tindakan musyawarah desa dan tindak lanjut hasil pilihan musyawarah desa, dikemukakan pernyataan sebagai berikut.
- d. Memastikan bahwa anggota masyarakat yang hadir sebagai peserta rapat desa mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dengan masyarakat lainnya.
- e. Selama debat desa, semua peserta akan memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk mengekspresikan ambisi, proposal, dan pandangan mereka secara vokal atau tertulis secara bertanggung jawab tentang topik strategis.
- f. Selama debat desa, saya meminta pengasuhan dan serta perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan.

Berikut adalah tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Menggunakan debat desa untuk mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam pembuatan kebijakan publik adalah contoh yang baik untuk hal ini.
- b. Bersiaplah untuk dapat mengomunikasikan ambisi, pendapat, dan minat yang berkaitan dengan topik strategis dengan otoritas yang lebih besar.
- c. Memfasilitasi pengembangan kegiatan musyawarah desa yang partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel.
- d. Mendorong terbentuknya lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram selama proses debat di desa.

- e. Ketika membuat penilaian atas kebijakan publik, penting untuk menerapkan cita-cita debat, kesepakatan tentang proses keluarga, dan kerja sama timbal balik ke dalam tindakan.

### **2.2.3 Indikator Kualitas *Governance***

Para ahli telah merancang sejumlah besar metode untuk menilai jumlah keberhasilan dan pertumbuhan pemerintahan yang baik di berbagai pengaturan. Sebagai bagian dari strateginya, *United Nations Development Programme* (UNDP) mengusung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip tata kelola. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan sembilan prinsip, termasuk partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis untuk masa depan.

Menurut Syakrani dan Syahrani (2009:131), Ganie-Rochman menciptakan empat konsep, antara lain akuntabilitas, supremasi hukum, informasi, dan transparansi, yang diringkaskannya sebagai berikut: Menurut Syakrani dan Syahrani (2009:132), Bhatta dibimbing oleh cita-cita yang sebanding dengan Amerika Serikat, terutama akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Mengidentifikasi kesulitan yang paling penting di sekitar tantangan baru juga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan keseluruhan dari proses penciptaan ide ini. Kaufman dkk (dalam Syakrani dan Syahrani, 2009:132) mencatat lima poin penting, yaitu sebagai berikut:

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kapasitas seseorang atau sekelompok orang untuk bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi atas aktivitas diri sendiri atau tanggung jawab orang lain terhadap suatu organisasi.

### 2. *Political stability* (stabilitas politik)

Stabilitas politik adalah keyakinan bahwa lembaga pemerintah di tingkat lokal, di tingkat negara bagian, atau di tingkat federal memegang komando dan bahwa segala sesuatunya tampak stabil dan berfungsi dengan baik.

### 3. *Government effectiveness*

Proses pelaksanaan kinerja pemerintah dalam hal pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat berjalan dengan baik, menurut administrasi.

### 4. *Regulatory quality*

Adalah cara mengendalikan masyarakat dengan penerapan norma-norma tertentu.

### 5. *Control of corruption*

Suatu kegiatan yang melibatkan pemantauan dan pemantauan penemuan kelainan anggaran yang mungkin menguntungkan satu pihak atau sekelompok orang lain.

Huther dan Shah (dalam Syakrani dan Syahriani, 2009:132-133) mengembangkan konsep komponen indeks kualitas pemerintahan, yang meliputi (a) indeks partisipasi warga, (b) indeks orientasi pemerintah, (c) indeks pembangunan sosial, (d) indeks manajemen ekonomi. Laboratorium

*good governance* provinsi Kalimantan Selatan membangun untuk mengembangkan dua matriks indeks *good governance* yang merupakan hasil “perkawinan silang” antara prinsip-prinsip *good governance* dan isu-isu strategis.

#### **2.2.4 Tahap Kinerja *Good Governance***

Tata kelola pemerintahan yang sehat setidaknya-tidaknya secara konseptual mengandung dua aspek, yaitu dimensi substantif dan prosedural. Dari segi substansi, konsep ini dapat dibagi menjadi dua kategori: gagasan besar dan perubahan. Yang pertama menyangkut gambaran ideal yang ingin diwujudkan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan gambaran ideal itu harus diwujudkan. Simpulkan kedua makna bertemu pada gagasan *Maxwell* dan *Covy* tentang pentingnya perilaku.

Dalam seluruh karyanya tentang kepemimpinan, teori *Maxwell* dapat dirangkum dalam dua simpul pemikiran, yaitu kekuatan tentang gagasan besar (*the power-of ideas*) yaitu keseharian itu penting (*every day matters*). Secara tidak langsung simpul pemikiran ini ingin mengemukakan, perubahan apapun harus dimulai dengan konstruksi gambaran ideal yang akan diwujudkan. Itu gagasan besar, tetapi gagasan ini akan menjadi utopia jika tidak ada aktivitas keseharian yang dikerjakan untuk mewujudkan gagasan besar itu.

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang sehat adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diimplementasi dan kemudian dinilai. Pada organisasi apapun, Gagasan besar seperti pemerintahan yang

efektif dan pengambilan keputusan yang bernuasa. Gagasan besar, seperti gagasan *good governance*, merupakan fungsi pemimpin puncak top (*top leader*). Teori perubahan mengajarkan bahwa, gagasan perubahan bisa berasal darimana saja, tetapi tentu saja, gagasan yang diprakarsai oleh pemimpin puncak, yang merupakan terobosan-terobosan politik, apalagi dilngkungan birokrasi pemerintah, mempunyai pengaruh lebih signifikan terhadap tingkat penerimaan implementasi. Di lingkungan ini, dengan kata lain, keinginan pemimpin puncak untuk melakukan perubahan seradikal apapun akan lebih diterima.

Kesungguhan pimpinan puncak dalam memantau tampak aktif dalam proses perubahan sudah tercakup dalam gagasan di atas tentang keinginan untuk melakukan perubahan, khususnya pada fase-fase awal proses perubahan. Teori perubahan terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan para pemimpin senior sangat penting sebelum perubahan dapat dilembagakan. Ini pertanda baik bahwa para pemimpin puncak terbuka untuk mengawasi perubahan ketika mereka siap untuk melakukannya. Untuk memastikan konsep perubahan mendapat dukungan administratif dari lembaga pelaksana, para pemimpin puncak juga harus terlibat aktif. Jika ada layanan seperti itu dijumlah dan kualitas sesuai dengan kebutuhan, maka rentang waktu keterlibatan aktif itu akan lebih pendek.

Jika otak lembaga pelaksana akut tidak aktif dan terserang penyakit, maka jangka waktu yang dibutuhkan akan lebih besar. Selama lembaga pelaksana dapat mengembangkan praktik terbaik administratif yang

mendukung terobosan dan kebijakan politik, yang seringkali berasal dari manajer, maka keterlibatan akan berakhir.

### **2.2.5 Karakteristik Pemimpin Yang Efektif**

Pemimpin/*leader* mempunyai macam-macam pengertian dari para ahli. Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya: Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggungjawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Kartono (2010: 18), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga ia dapat mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengannya untuk mencapai satu atau lebih tujuan.

Henry Pratt Fairchild (dalam Kartono, 2010:23) ia mendefinisikan pemimpin sebagai “seseorang yang memprakarsai perilaku sosial yang mengatur, memimpin, mengkoordinasikan, atau membimbing tindakan atau usaha orang lain”. Sebagaimana dijelaskan Sedarmayati (2009: 199), bahwa pemimpin ialah:

1. Kemampuan meyakinkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginannya.
2. Ada orang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan ada orang yang akan bertanggung jawab atas manajemen. Individu yang sama harus menyelesaikan dua hal secara efektif: manajemen dan kepemimpinan.

3. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan.

Istilah "pemimpin" mengacu pada individu dan kelompok orang yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab dalam suatu organisasi dan sebagai akibatnya memiliki bawahan.

Hal ini dapat diuraikan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk mengelola karyawannya demi mencapai tujuan organisasi, menurut para ahli di atas. Kualitas seorang pemimpin adalah ciri-ciri atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin untuk melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya. Sunindhia dan Widiyanti (dikutip dalam Hakiem 2003) menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki empat kualitas atau syarat sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin harus peka akan lingkungannya dan menerima saran-saran dan nasehat dari orang-orang di sekitarnya.
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya.
3. Para pemimpin harus menindaklanjuti komitmen mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi mereka.
4. Pemimpin dapat mengambil keputusan, harus pandai, cakap, dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Teori kepemimpinan berdasarkan ciri (traits theory) memberi petunjuk tentang ciri-ciri pemimpin yaitu (Siagian, 2003):

1. Pengetahuan umum yang luas.
2. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
3. Kemampuan analitik.

4. Sifat inklusif atau rasa ingin tahu.
5. Keterampilan berkomunikasi secara efektif.
6. Kemampuan menentukan skala prioritas.
7. Rasionalitas.
8. Keteladanan.
9. Ketegasan.
10. Orientasi masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemimpin harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpin. Keahlian ini terlihat dari sifat, karakter, dan perilaku yang diekspresikan dalam setiap tindakan.

Secara umum, seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti (1) tanggung jawab yang seimbang, yang berarti bahwa dia harus bertanggung jawab baik untuk pekerjaan maupun mereka yang melaksanakan pekerjaan itu; (2) model peranan yang positif, peranan di sini adalah tanggung jawab, perilaku, atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan khusus tertentu; (3) memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemimpin yang baik harus bisa menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas, serta dengan cara yang tepat; (4) memiliki pengaruh positif, pemimpin yang baik memiliki pengaruh terhadap karyawannya dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal-hal yang positif (Pulungan, 2001).

### **2.2.6 Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi**

Tergantung pada sudut pandang dari mana individu memandang kepemimpinan, berbagai perspektif dan definisi kepemimpinan disajikan. Karakteristik kepemimpinan, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, posisi jabatan administratif, dan penilaian lain tentang legitimasi pengaruh semuanya dapat diklasifikasikan sebagai karakteristik kepemimpinan (Wahjosumijo, 2002:35). Kapasitas seorang pemimpin untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku orang lain didefinisikan sebagai berikut: Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengatur dan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan bahwa setiap orang dapat melakukan peran seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang harus berlangsung dan dipertahankan dalam kehidupan makhluk sosial seperti manusia. Agar manusia dapat hidup selaras dengan kodratnya, mereka harus bisa keluar dari ketergantungan pada orang lain dan membentuk komunitas mereka sendiri. Hidup dalam masyarakat memerlukan kehadiran para pemimpin dan pelaksanaan kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi arah atau tujuan yang dimaksudkan, serta cara terbaik untuk mencapai arah atau tujuan tersebut. Dalam organisasi, seperti sekolah, kepemimpinan seseorang berfungsi sebagai katalis untuk proses kolaborasi di antara orang-orang yang

terjadi. Untuk lebih spesifiknya, konsep kepemimpinan akan dibahas lebih rinci di bawah ini.

Penulis perilaku organisasi, Paul Heresay dan Keneth H. Blanchard, yang dikutip oleh Pandji Anoragan dalam bukunya perilaku organisasi, mendefinisikan seorang pemimpin sebagai orang yang dapat mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan tertentu di bawah kondisi tertentu (Pandji Anoraga, 2002:98).

Menurut Martin J. Gannon sebagaimana dikutip Pandji Anoragan, pemimpin adalah seorang atasan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, sedangkan Kartini Kartono (2003:84) mendefinisikan pemimpin sebagai pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk berkolaborasi guna mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, kemudian disimpulkan bahwasanya pemimpin adalah seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur hierarki organisasi. Dia bertanggung jawab atas keberhasilan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Pemimpin selalu melibatkan orang lain, dan dapat dikatakan bahwa di mana ada pemimpin, di situ ada pengikut, yang harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan mereka. Agar kepemimpinan muncul dalam kondisi tertentu, satu individu harus memberikan pengaruh atas tindakan orang lain. Kepemimpinan seseorang berfungsi sebagai faktor pendorong dalam proses kerjasama antar individu dalam organisasi,

khususnya lembaga pendidikan. Penting untuk membedakan antara kepemimpinan dan manajemen berdasarkan alasan ini. RD Agarwal, sebagaimana dilansir Pandji Anoraga (2002: 125), menyatakan bahwa “keterampilan memahami orang lain untuk mengarahkan kehendaknya” adalah definisi dari kepemimpinan.

Kapasitas dan kemauan untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemimpin. Menurut Hall, kepemimpinan dicirikan sebagai obat yang relatif sederhana untuk gejala masalah organisasi yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Tujuan kepemimpinan, dengan kata lain, adalah untuk mempengaruhi organisasi lain, dalam contoh ini karyawan atau bawahan, untuk memenuhi tujuan perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan didefinisikan oleh kapasitas untuk mempengaruhi orang lain. Untuk mempengaruhi orang, pemimpin harus terbiasa dengan berbagai metode, termasuk:

1. Menggunakan fakta dan data untuk mengemukakan dan alasan yang logis.
2. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang ada dalam perusahaan.
3. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan.
4. Melakukan negosiasi.
5. Menggunakan pendekatan langsung dan kalau terpaksa menggunakan kedudukan lebih tinggi dalam organisasi.
6. Memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang.

7. Mengingat apa yang telah dikatakan sejauh ini, terbukti bahwa kapasitas untuk memimpin dan kemauan untuk mengikuti pemimpin sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang ditunjukkan kepada pemimpin itu sendiri.

Agar proses berjalan lancar di dalam organisasi, sangat penting untuk memiliki pemimpin yang dapat mengkoordinasikan proses dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Sosok pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengenali dan memahami bahwa keteladanan yang diberikannya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada jika hanya menghambat, dan yang dapat mengubah dirinya menjadi alat yang cakap dan efektif yang mendukung kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin yang sukses adalah orang yang telah memperoleh wawasan pribadi untuk berkembang bersama perusahaan dan menyesuaikan perspektif mereka sendiri, sementara juga mengakui bahwa keterbatasan mereka memungkinkan munculnya berbagai gaya kepemimpinan.

Organisasi yang terus sukses akan menantang para pemimpinnya untuk memikirkan kembali bagaimana menskalakan prosedur yang sebelumnya berhasil dalam skala lokal dan dengan orang-orang muda ke dalam proses yang berhasil dalam skala global dan dengan pekerja yang lebih senior. Untuk membangun dan merevitalisasi sebuah organisasi, diperlukan visi, keyakinan, dan energi yang besar. Perlu adanya evaluasi, kebijakan, dan hal-hal sebagai berikut:

1. Jujur (*honest*)
2. Kompeten (*competent*)
3. Melihat ke dalam (*forward-looking*)
4. Selalu memicu inspirasi (*inspiring*)
5. Pandai dan cerdas (*intelligent*)
6. Obyektif, berlaku adil (*fair-minded*)
7. Berwawasan luas (*broadminded*)
8. Berani mengambil resiko (*courageous*)
9. Tidak basa basi, langsung pada persoalan (*straightforward*)
10. Penuh imajinasi (*imaginative*)

Perilaku pemimpin berbagai riset menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan sangat bervariasi berdasarkan situasi yang dihadapi.

### **2.2.7 Pelayanan Publik**

Memberikan pelayanan publik merupakan bagian dari amanat pemerintah, sehingga pemerintah dan pelayanan publik saling terkait. Tingkat kepuasan masyarakat umum terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur efektivitasnya. Sebagai cara penataan penyelenggaraan pemerintahan secara individu maupun kelompok, tugas berperan dalam munculnya pelayanan publik. Kehidupan masyarakat diperkaya dengan pelayanan publik karena tidak semua pelayanan atau jasa dipasok oleh swasta, sehingga pemerintah berkewajiban menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang tidak diberikan.

Sejalan dengan norma dan proses fundamental yang telah dianut, Sinambela (2011:5), mendefinisikan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan (*service*) kepada individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: penyediaan produk, jasa, dan/atau pelayanan administrasi kepada seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan publik. Berikut ini adalah contoh asas-asas hukum yang mengatur pelayanan publik:

1. Kepentingan umum

Secara khusus, pemberian pelayanan tidak boleh diprioritaskan di atas kepentingan individu dan kelompok.

2. Kepastian hukum

Yaitu janji bahwa hak dan kewajiban akan dipenuhi dalam pemberian jasa.

3. Kesamaan hak

Dengan demikian, pemberian layanan tidak membeda-bedakan atas dasar ras atau suku bangsa atau keyakinan agama.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Akibatnya, hak harus sebanding dengan kewajiban, dan ini berlaku untuk penyedia layanan dan juga konsumen.

5. Keprofesionalan

Penyedia layanan harus dihadapkan pada persaingan dalam industri khusus mereka.

6. Partisipatif

Keterlibatan masyarakat dalam pemberian layanan telah meninggalkan warisan abadi untuk memenuhi tujuan, kebutuhan, dan harapan orang-orang yang tinggal di wilayah yang dilayaninya.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8. Keterbukaan

Dengan kata lain, setiap tanda terima pelanggan memiliki akses mudah ke informasi yang mereka butuhkan mengenai layanan tertentu yang mereka minta.

9. Akuntabilitas

Dengan kata lain, proses pemberian layanan harus bertanggung jawab kepada hukum.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Ini semua tentang menciptakan rasa keadilan dalam layanan dengan menyediakan fasilitas bagi penduduk yang kurang beruntung.

11. Ketepatan waktu

Dengan kata lain, semua layanan selesai sesuai jadwal dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

## 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Dengan kata lain, Anda dapat dengan mudah, cepat, dan terjangkau mendapatkan layanan yang Anda butuhkan.

Berdasarkan definisi yang disajikan di bawah ini, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan tertentu atau melaksanakan kewajiban legislatif.

*Good governance* merupakan keterkaitan antara negara dan warga negaranya. Pemerintah, serta masyarakat umum, mendapat manfaat dari studinya tentang seberapa efektif kinerja layanan publik dalam masyarakat yang dikelola dengan baik. Pemerintah berkompeten untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan pemerintah mampu menjalankan peran tersebut dengan kualitas yang baik, seperti yang tertuang dalam pernyataan tersebut. Ketika berbicara tentang cincin, yang pertama mengacu pada mereka, sedangkan yang kedua berbicara tentang membuatnya. Ide ringht pelayanan publik memiliki konotasi signifikan yang dapat dijelaskan.

Setidaknya ada dua cara untuk melihat kapasitas pelayanan publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat. Pertama, menunjukkan sebuah gerakan dalam mainset, budaya kerja dari berorientasi pada diri sendiri menjadi lebih berkonsentrasi pada orang lain. Sebagai akibat dari budaya birokrasi yang meminta pelayanan, dan tumbuhnya kompetensi dalam melakukan penilaian kebutuhan dan perencanaan dalam

memberikan pelayanan publik, sulit untuk dicapai. Birokrasi yang terbiasa tidak akrab dengan masyarakat juga akan kesulitan dalam hal ini. Gagasan untuk melakukannya dalam pengaturan yang sama menambah lapisan kompleksitas.

### **2.2.8 Definisi Pembangunan**

Menurut Nurman (Siagian, 1994) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan sadar oleh suatu bangsa, Negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, budaya (Alexander, 1994). Kemudian Nurman (Tikson, 2005) menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

### **2.2.9 Definisi Infrastruktur**

Secara umum Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur tersebut dapat berupa fasilitas teknis, fisik, system, ataupun perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan social masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi makro, dimana pembangunan infrastruktur

menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek *multiplier* dan ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada guna meningkatkan aliran barang dari orang yang beredar atau sirkulasi di seluruh perekonomian (<https://kpbu.kemenkeu.go.id>, Andi Triwayan).

Menurut Setyaningrum dalam Yanti MS (2018: 24) Infrastruktur adalah biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Definisi lain mengenai yaitu mengacu pada fasilitas fisik dan termasuk kerangka kerja organisasi, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Selain dari itu, Suparmoko (2002) infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi/ pengairan, transportasi, telekomunikasi, air dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Ketidacakupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Yanti MS, 2018: 25).

### **1. Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur yang perannya cukup vital dan merupakan variable dalam penelitian ini dari sekian banyak pembangunan infrastruktur salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Menurut Grigg dalam Fathani Muttakin (2018: 9-10) infrastruktur merupakan system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan, gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan social maupun kebutuhan ekonomi.

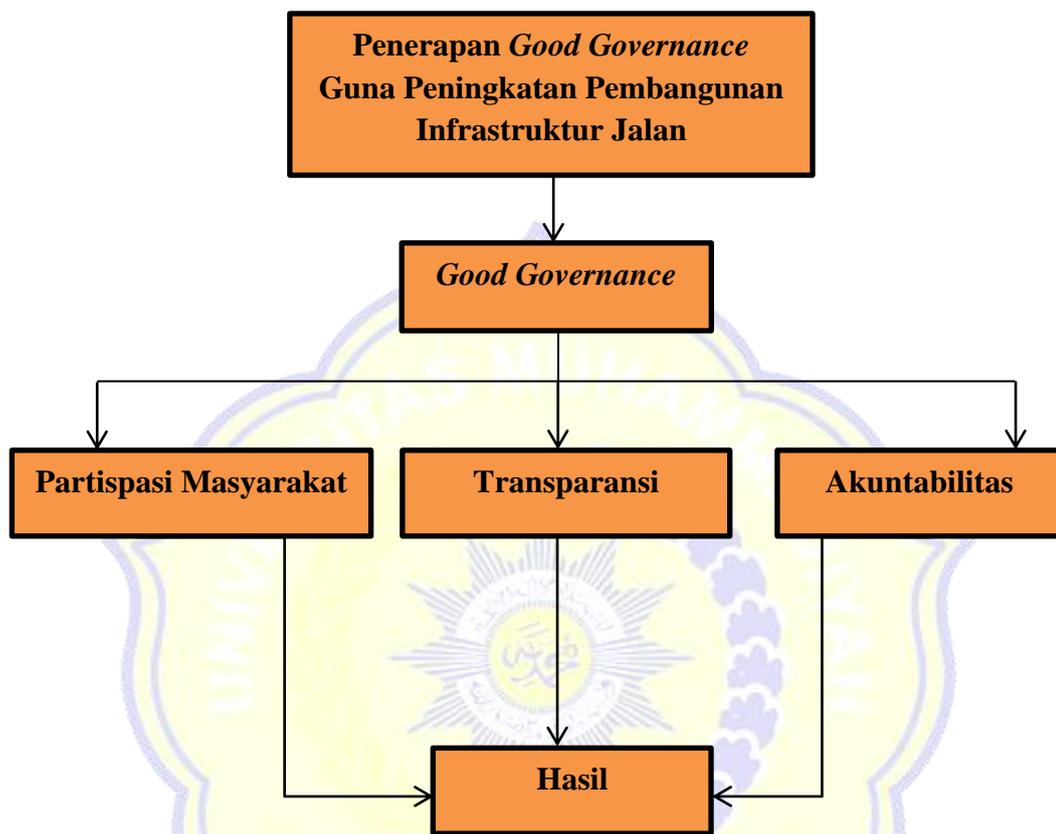
Selanjutnya, lebih khusus menurut Adji Adisasmita Fathani Muttakin (2018: 11) menjelaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air artinya jalan merupakan sarana transportasi darat yang meliputi rambu lalu lintas, pagar pembatas jalan, kualitas jalan, lebar jalan, penghubung jalan, seperti jembatan dan lain sebagainya.

#### **2.2.10 Kerangka Pikir**

Menurut Sugiyono (2012:89), kerangka berpikir merupakan penggabungan dari berbagai gagasan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia merupakan salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa mengembangkan tata kelola yang baik di lembaga public merupakan langkah strategis. Seluruh pemangku kepentingan dalam tata kelola yang efektif menyadari pentingnya pelayanan public sebagai motor penggerak (Darmanerus

Duarmas, dkk: 2016). Penting untuk dicatat bahwa kerangka berpikir studi ini dapat dicirikan sebagai berikut.

**Bagan 2.1**



*Sumber : Diolah oleh peneliti*

### 2.2.11 Definisi Konseptual

1. *Good governance*: suatu tindakan yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintah yang transparansi dan responsive serta menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang efektif dan efisiensi.

2. Penerapan: sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Pembangunan: proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, budaya.
4. Infrastruktur jalan: prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air artinya jalan merupakan sarana transportasi darat yang meliputi rambu lalu lintas, pagar pembatas jalan, kualitas jalan, lebar jalan, penghubung jalan, seperti jembatan dan lain sebagainya.

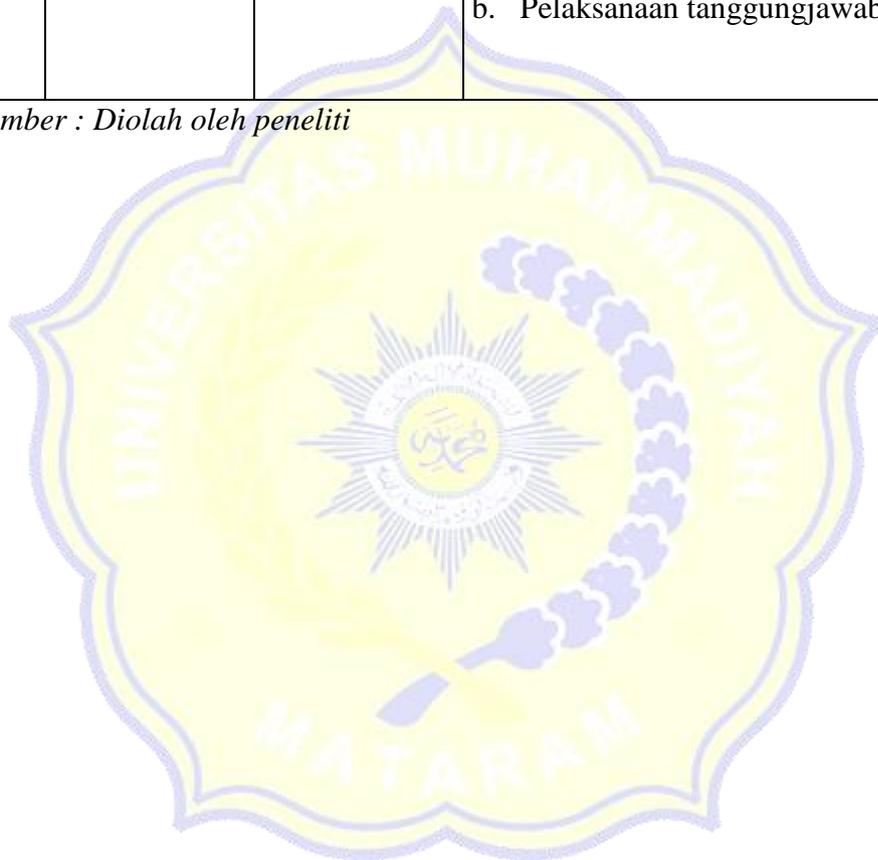
#### **2.2.12 Definisi Operasional**

1. Partisipasi Masyarakat, yaitu keberadaan manusia yang berinteraksi menurut sistem konversi yang berkesinambungan dan dihubungkan oleh perasaan identitas bersama disebut sebagai masyarakat
2. Transparansi, yaitu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan hukum.
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggungjawaban.

**Tabel 2.2 Definisi Operasional**

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	<i>Good Governance</i>	Partisipasi Masyarakat	a. Keterlibatan Masyarakat b. Peran Masyarakat
		Transparansi	a. Penyediaan Informasi b. Kemudahan dalam mengakses informasi
		Akuntabilitas	a. Pengambilan keputusan b. Pelaksanaan tanggungjawab

Sumber : Diolah oleh peneliti



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data yang memiliki kriteria tertentu yaitu valid (Sugiono, 2019 : 2). Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena data-data yang akan dikumpulkan bersifat deskriptif berdasarkan kasus yang akan diteliti yaitu “Penerapan *Good Governance* guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan sebagai instrumen yang secara langsung akan mengumpulkan data melalui beberapa yaitu obsevasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi dengan informan kunci di lapangan. Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis agar data yang diperoleh benar keasbsahannya sehingga penelitian ini layak diuji kebenarannya.

Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang juga bisa untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Tipe penelitian ini dianggap sangat efektif untuk dipakai karena menggambarkan keadaan atau objek yang ada pada masa sekarang sehingga secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

### **3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Dan waktu penelitian berlangsung kurang lebih 1 bulan.

### **3.3. Teknik Penentuan Narasumber**

Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang atau subjek tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti mendapat informasi atau tentang situasi yang diteliti.

Subjek dari penelitian ini adalah Camat Donggo, Kepala Desa Kala, Kepala Desa O'o, Kepala Desa Mpili, dan Masyarakat Kecamatan Donggo pada umumnya.

### **3.4. Sumber Data**

Sugiyono (2014) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data bersumber dari data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan data secara langsung peneliti turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan cara observasi dan wawancara.

**Tabel 3.1**  
**Narasumber Penelitian**

No	Narasumber	Jumlah
1	Camat Donggo	1
2	Kepala Desa Kala	1
3	Kepala Desa O'o	1
4	Kepala Desa Mpili	1
5	Masyarakat Kecamatan Donggo	3
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

*Sumber : Diolah oleh peneliti*

Adapun alasan peneliti menjadikan mereka menjadi subjek dalam penelitian ini ;

1) Camat Donggo

Dijadikan sebagai informan karena Camat merupakan pimpinan kecamatan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati. Dalam hal ini, camat donggo memiliki tugas untuk melakukan kordinasi terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasana umum agar masyarakat setempat tentram dan tertib. Kemudian selanjutnya bahwa Camat Donggo sebagai informan karena camat itu memiliki informasi yang jelas terkait dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak selama bertahun-tahun dan sejauh mana kordinasi Camat Donggo terkait dengan realita kerusakan jalan di Kecamatan Donggo kepada Bupati Bima.

2) Kepala-kepala Desa

Kepala Desa Kala, O'o, dan Mpili dipilih sebagai informan penelitian karena mereka yang mempunyai wewenang, tugas, dan

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya serta melaksanakan tugas dari pemerintahan daerah. Dalam hal ini, lokasi yang menjadi kerusakan jalan selama bertahun-tahun tepat di wilayah administratif kepala-kepala desa tersebut. Kemudian peneliti dapat mencari informasi dan data berupa kerusakan jalan serta melalui data kerusakan jalan sudah melakukan kordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan.

### 3) Masyarakat Kecamatan Donggo

Masyarakat menjadi fokus sebagai informan, karena masyarakat adalah satu-satunya warga pengguna jalan, merasakan keberadaan infrastruktur, serta yang paling memahami kawasan di sekitar jalan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang lebih tahu terkait problem-problem infrastruktur secara detail, bagaimana pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat, yang seharusnya wajib dijamin oleh pemerintah daerah apakah sudah sesuai yang diharapkan masyarakat atau malah sebaliknya. Dalam hal ini, masyarakat menjadi informan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat mereka terhadap sosok Bupati Bima selama masa kepemimpinannya, serta perkembangan pemerintah di masa jabatannya menurut perspektif masyarakat. Terakhir, peneliti meminta bantuan menyebarkan angket survey kepada masyarakat Kecamatan Donggo sebagai bentuk validasi data mengenai pendapat mereka terhadap kinerja pemerintah daerah dan perkembangan selama masa jabatannya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap informasi yang ada padanya atau lewat dokumen. Dalam mendapatkan data sekunder, peneliti dapat memperoleh melalui gambaran di lokasi penelitian, dokumen dan foto-foto yang ada di lokasi, keadaan lingkungan, dan foto-foto yang peneliti hasilakan sendiri yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti (Colid Narbuko, 2002 : 70). Peneliti menggunakan metode ini yaitu untuk mengatasi secara langsung data yang berada di lapangan, terutama data terkait “Penerapan *Good Governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”.

#### 2. Wawancara/ Interview

Tehnik wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk

menemukan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

### 3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui catatan tertulis, fakta yang tersip, seperti catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2018: 280) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun proses analisis data dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman yang pokok, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alas

an data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berupaya mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna memadatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.

